

BAGIAN ANGGARAN 032



LAPORAN KEUANGAN

SATKER BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2025

**JALAN HUSEIN HAMZAH NOMOR 01 PALLIMA PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT**

Telp. (0561) 766691, email : bpslpontianak@gmail.com

<http://bpslpontianak.kkp.go.id/>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, Juni 2025

Kepala Balai,



Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP. 19740513 200901 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Lampiran dan Daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Juni 2025

Kepala Balai,



Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP. 19740513 200901 1 004

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak Semester I Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 3) PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 4) PMK Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

dan berdasarkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Laporan Realisasi Anggaran adalah Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode Januari s.d Juni Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1,096,757,329 atau mencapai 60,93 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1,800,000,000.

Realisasi Belanja Negara pada Periode Januari s.d Juni Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 5,194,158,232 atau mencapai 30,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 16,846,280,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 21,590,387,536 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 66,980,159; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 21,523,407,377; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing – masing sebesar Rp 341,232,433 dan Rp 21,249,155,103.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1,093,760,463 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 5,831,478,219 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (4,737,717,756). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 3,330,200 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (4,734,387,556).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 21,886,141,756 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (4,734,387,556) kemudian dikurangi dengan koreksi – koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4,097,400,903 juga dikurangi kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp (636,986,653) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 21,249,155,103.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan -

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1,800,000,000	1,096,757,329	61	1,295,700,777
JUMLAH PENDAPATAN		1,800,000,000	1,096,757,329	61	1,295,700,777
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	8,167,000,000	3,844,065,455	47	3,425,245,158
Belanja Barang	B.4	8,565,780,000	1,350,092,777	16	4,447,576,991
Belanja Modal	B.5	113,500,000	-	-	406,262,322
JUMLAH BELANJA		16,846,280,000	5,194,158,232	31	8,279,084,471

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK NERACA PER 30 Juni 2025 dan 2024

(DalamRupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		60,000,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Belanja dibayar di Muka (prepaid)		-	-
Piutang Bukan Pajak		333,334	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		333,334	-
Persediaan		6,646,825	2,910,400
JUMLAH ASET LANCAR		66,980,159	2,910,400
ASET TETAP			
Tanah		16,176,340,000	16,176,340,000
Peralatan dan Mesin		7,549,546,769	7,549,546,769
Gedung dan Bangunan		4,221,848,220	4,221,848,220
Jalan. Irigasi dan Jaringan		690,656,250	690,656,250
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		- 7,114,983,862	- 6,735,010,137
JUMLAH ASET TETAP		21,523,407,377	21,903,381,102
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain		-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		21,590,387,536	21,906,291,502
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga		232,068,034	20,149,746
Utang Yang Belum Ditagihkan		49,164,399	-
Uang Muka dari KPPN		60,000,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		341,232,433	20,149,746
JUMLAH KEWAJIBAN		341,232,433	20,149,746
EKUITAS			
Ekuitas		21,249,155,103	21,886,141,756
JUMLAH EKUITAS		21,249,155,103	21,886,141,756
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,590,387,536	21,906,291,502

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1,093,760,463	1,284,193,344
JUMLAH PENDAPATAN		1,093,760,463	1,284,193,344
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,067,970,489	3,635,207,450
Beban Persediaan	D.3	20,622,064	49,690,090
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,133,115,799	2,386,079,954
Beban Pemeliharaan	D.5	129,772,056	104,570,861
Beban Perjalanan Dinas	D.6	100,024,086	2,407,111,887
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	98,235,000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	379,973,725	374,136,393
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		5,831,478,219	9,055,031,635
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4,737,717,756)	(7,770,838,291)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3,330,200	11,674,100
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3,330,200	11,674,100
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4,734,387,556)	(7,759,164,191)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4,734,387,556)	(7,759,164,191)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	21,886,141,756	21,984,095,964
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4,734,387,556)	(7,759,164,191)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.8	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		4,097,400,903	6,983,383,694
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(636,986,653)	(775,780,497)
EKUITAS AKHIR	E.9	21,249,155,103	21,208,315,467

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Istimewa Pontianak

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau – pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor [PER.22/MEN/2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak diresmikan pada tanggal 27 Januari 2009 yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau – pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Januari s.d Juni Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI adalah Sistem Akuntansi Terintegrasi. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan BMN dan Laporan Persediaan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Januari s.d Juni Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan – kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang

dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR

atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain – Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain – lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih

Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos – pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua. Keterbandingan penyajian akun – akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp 16,846,280,000 dengan rincian sumber dana sebagai berikut :

Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 11,421,280,000.

PNBP sebesar Rp 5,425,000,000.

*Realisasi
Pendapatan Rp
1,096,757,329*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1,096,757,329 atau mencapai 60,93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 1,800,000,000. Pendapatan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut

Pontianak terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,127,154
Pendapatan Perizinan Lainnya	903,420,000	536,490,000
Pengembalian Pendapatan Perizinan Lainnya	0	-
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	896,580,000	554,809,975
Pengembalian Pendapatan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,330,200
Jumlah	1,800,000,000	1,096,757,329

Realisasi Pendapatan Periode Tahun Anggaran 2025 BPSPL Pontianak adalah :

- a) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Rp 2,127,154 adalah pendapatan atas penggunaan rumah dinas.
- b) Pendapatan dari Jasa Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 554,809,975 berupa pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.
- c) Pendapatan dari Pelayanan Perizinan Lainnya sebesar Rp 536,490,000 penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.
- d) Penerimaan kembali belanja barang TAYL adalah penerimaan atas belanja barang sebesar Rp 3,330,200 dari potongan SPM atas Pembayaran

Kekurangan Gaji bulan November tahun 2024 s.d. bulan Februari tahun 2025 atas Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.

Realisasi

Belanja Negara

Rp

5,194,158,232

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 5,194,158,232 atau 30,86% dari anggaran belanja sebesar Rp 16,846,280,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	8,167,000,000	3,848,876,436	47.13
Belanja Barang	8,565,780,000	1,350,092,777	15.76
Belanja Modal	113,500,000	-	-
Total Belanja Kotor	16,846,280,000	5,198,969,213	30.86
Pengembalian	-	4,810,981	-
Jumlah	16,846,280,000	5,194,158,232	30.83

Pengembalian adalah pengembalian atas belanja pegawai berupa pengembalian atas pembulatan gaji PNS senilai Rp 981 dan pengembalian atas tunjangan umum PNS senilai Rp 4,810,000. Semua pengembalian adalah bentukan langsung (otomatis) aplikasi gaji PPABP, setoran atau potongan langsung bersamaan dengan SPM.

Belanja Pegawai

Rp

3,844,065,455

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Periode sampai dengan 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3,844,065,455.

Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	2025
Belanja Gaji, Tunjangan Gaji dan	1,952,789,413
Belanja Lembur	26,806,000
Belanja Tunj. Khusus	1,869,281,023
Jumlah Belanja Kotor	3,848,876,436
Pengembalian Belanja Pegawai	4,810,981
Jumlah Belanja	3,844,065,455

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BPSPL Pontianak memiliki total pegawai 51 orang dengan detail 45 orang PNS, 2 CPNS dan 4 orang PPPK.

1 orang PPPK pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Desember 2023.

3 orang PPPK pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Maret 2024.

2 orang CPNS pada BPSPL pontianak mulai bekerja Juni 2025.

Pengembalian belanja pegawai adalah pengembalian atas pembulatan gaji PNS senilai Rp 981 dan pengembalian atas tunjangan umum PNS senilai Rp 4,810,000. Semua pengembalian adalah bentukan langsung (otomatis) aplikasi gaji PPABP, setoran atau potongan langsung bersamaan dengan SPM.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2025
1,350,092,777 sebesar Rp 1,350,092,777.

Rincian Belanja Barang

URAIAN	2025
Belanja Barang dan Jasa	1,125,112,595
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,993,064
Belanja Pemeliharaan	116,831,926
Belanja Perjalanan	89,155,192
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	0
Jumlah Belanja Kotor	1,350,092,777
Pengembalian Belanja	-
Jumlah Belanja	1,350,092,777

Belanja barang pada BPSPL Pontianak telah mencapai 41,49 persen.

Belanja Modal

Rp 0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Realisasi Belanja Modal

URAIAN	2025
Belanja Modal Tanah	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Belanja Modal Lainnya	0
Jumlah Belanja Kotor	0
Pengembalian	0
Jumlah Belanja	0

Pada semester 1 tahun anggaran 2025 belanja modal belum terealisasi dikarenakan blokir anggaran PNBPN.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0.

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0
Belanja Modal BLU	0
Jumlah Belanja Kotor	0
Pengembalian	0
Jumlah Belanja	0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 60.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 sebesar Rp 60.000.000. Kas tersebut adalah senilai nilai UP Tunai Rupiah Murni sesuai pengajuan awal tahun. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0. Nilai tersebut merupakan nilai pajak yang dibayarkan di bulan Oktober.

*Piutang PNB
Rp 333,334*

C.4 Piutang PNB

Terdapat Piutang PNB pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 sebesar Rp 333,334. Nilai tersebut adalah nilai piutang Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi dari sewa rumah dinas.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 .

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 .

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 .

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp 0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak ada Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 .

*Persediaan
Rp 6,646,825*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 sebesar Rp 6,646,825.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Alat tulis	60.000
2	Tinta Tulis, Tinta Stempel	80.000
3	Buku Tulis	50.000
4	Ordner dan Map	175.000
5	Cutter	14.900
6	Alat Perekat	90.000
7	ATK Lainnya	1.009.125
8	Kertas HVS	1.887.000
9	Mouse	420.000
10	Bahan Komputer Lainnya	2.860.800
Nilai Total		6.646.825

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan sudah di distribusi ke unit masing – masing.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 .

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per Desember 2024 .

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 .

*Tanah
Rp
16,176,340,000*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 sebesar Rp 16,176,340,000. Tidak ada penambahan atas nilai Aset tanah pada TA 2025. Tanah tersebut seluas 7.402 meter persegi berlokasi di Jalan Husein Hamzah Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

*Peralatan dan
Mesin
Rp
7,549,546,769*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 adalah Rp 7,549,546,769. Terdapat peningkatan nilai Peralatan dan Mesin dari 6,853,575,947 pada 2023 menjadi 7,549,546,769 per 30 Juni 2025 karena terdapat belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan Desember 2024 senilai Rp 695,970,822.

Gedung dan

Bangunan

Rp

4,221,848,220

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 adalah Rp 4,221,848,220. Tidak terdapat peningkatan nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan Semester 1 Tahun 2025.

Jalan.Jaringan

dan Irigasi

Rp690,656,250

C.17 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 sebesar Rp 690,656,250. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Lainnya

Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 adalah Rp 0.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan Rp

0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap Rp

(7,114,983,862)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 Rp (7,114,983,862). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7,250,732,269	5,955,356,819	1,295,375,450
2	Gedung dan Bangunan	4,053,588,220	704,915,616	3,348,672,604
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	690,656,250	454,711,427	235,944,823
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		11,994,976,739	7,114,983,862	4,879,992,877

Aset Tak

Berwujud Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025.

Aset Lain-Lain

Rp 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain – lain per 30 Juni 2025 adalah Rp 0. Aset Lain – lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi

Penyusutan

dan Amortisasi

Aset Lainnya

Rp 0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	0	0	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka
dari KPPN Rp
60.000.000*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 sebesar Rp 60.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
232,068,034*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 232,068,034. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp 232,068,034. Dengan rincian sebagai berikut :

Gaji Induk Juli 2025	207,582,198
Gaji PPPK Juli 2025	16,322,836
Gaji PPNPN Juni 2025	8,163,000
Total	232,068,034

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp 0*

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak ada Pendapatan yang Ditangguhkan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025.

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp 0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp 0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak ada Beban yang Masih Harus Dibayar pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025.

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp
49,164,399*

C.29 Utang Yang Belum Ditagihkan

Terdapat Utang Yang Belum Ditagihkan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 30 Juni 2025 sebesar Rp 49,164,399. Nilai tersebut adalah nilai yang muncul akibat transaksi – transaksi yang belum SP2D.

*Ekuitas
Rp
21,249,155,103*

C30. Ekuitas

Pada Laporan Keuangan Ekuitas per 30 Juni 2025 sebesar Rp 21,249,155,103. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp

1,093,760,463

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,093,760,463. Jumlah tersebut tidak sama dengan nilai pada LRA sebesar Rp 1,096,757,329, terdapat selisih sebesar Rp 2,996,866. Nilai selisih pendapatan tersebut karena terdapat pendapatan yang bersumber dari penerimaan atas penggunaan rumah dinas. Pada Laporan Operasional, pendapatan adalah yang bersumber dari kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pendapatan	Pengembalian	Netto
1	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2,460,488	0	2,460,488
2	Pendapatan Perizinan Lainnya	536,490,000	-	536,490,000
3	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	554,809,975	-	554,809,975
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	0	-
Pendapatan LO		1,093,760,463	-	1,093,760,463

Beban Pegawai

Rp 4,067,970,489

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai tersaji pada Laporan Keuangan 30 Juni 2025 sebesar Rp 4,067,970,489.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat

negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

URAIAN	2025
Beban Gaji Pokok PNS	1,442,112,700
Beban Pembulatan Gaji PNS	22,481
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	82,095,780
Beban Tunj. Anak PNS	23,520,650
Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	221,010,000
Beban Tunj. PPh PNS	16,467,583
Beban Tunj. Beras PNS	70,319,820
Beban Uang Makan PNS	127,028,000
Beban Tunjangan Umum PNS	17,275,000
Beban Gaji Pokok PPPK	115,329,600
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,836
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	5,766,480
Beban Tunj. Anak PPPK	1,153,296
Beban Tunj. Fungsional PPPK	15,120,000
Beban Tunj. Beras PPPK	5,214,240
Belanja Uang Makan PPPK	13,246,000
Beban Uang Lembur	26,806,000
Beban Uang Lembur PPPK	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,739,880,687
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	129,400,336
Jumlah Beban	4,067,970,489

Nilai pada LO berbeda dengan nilai pada LRA. Nilai pada LRA sebesar Rp 3,844,065,455. Terdapat selisih antara LO dengan LRA sebesar 223,905,034. Selisih tersebut adalah nilai belanja pegawai yang masih harus dibayar yang secara SP2D cair di bulan berikutnya.

Beban

*Persediaan Rp
20,622,064*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang tersaji pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2025 sebesar Rp 20,622,064. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang – barang yang habis pakai, termasuk barang –

barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA, LRA tercatat senilai Rp 18,993,064. Selisih senilai Rp 1,629,000 adalah nilai transaksi atas GUP yang SP2D tercatat dibulan berikutnya.

*Beban Barang
dan Jasa Rp
1,133,115,799*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Pada Laporan Keuangan jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 sebesar Rp 1,133,115,799. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	2025
Beban Keperluan Perkantoran	109,574,077
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,591,050
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51,000,000
Beban Honor Operasional Lainnya	4,221,689
Beban Barang Operasional Lainnya - Pandemi Covid-19	0
Beban Bahan	2,150,200
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Beban Langganan Listrik	63,137,752
Beban Langganan Telepon	35,095,520
Beban Langganan Air	4,071,513
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0
Beban Sewa	483,305,000
Beban Jasa Profesi	1,300,000
Beban Jasa Lainnya	377,668,998
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0
Jumlah	1,133,115,799

Terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA pada beban barang dan jasa. Pada LRA tercatat senilai Rp 1,125,112,595. Selisih senilai Rp 8,003,204 adalah nilai transaksi atas GUP yang SP2D tercatat dibulan berikutnya.

Beban

*Pemeliharaan Rp
129,772,056*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 sebesar Rp 129,772,056. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Untuk beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dengan pilihan kode akun. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	2025
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44,910,328
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84,861,728
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	0
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	0
Jumlah	129,772,056

Beban pemeliharaan Gedung dan bangunan di Pontianak dilaksanakan perbaikan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal bukan menambah nilai aset. Terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA pada beban pemeliharaan. Pada LRA tercatat senilai Rp 116,831,926. Selisih senilai Rp 12,940,130 adalah nilai transaksi atas GUP yang SP2D tercatat dibulan berikutnya.

Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Pontianak dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan, perbaikan peralatan dan mesin berupa personal computer, printer, genset, AC,

kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan inventaris kantor lainnya.

Beban

Perjalanan Dinas

Rp 100,024,086

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 sebesar Rp 100,024,086. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	2025
Beban Perjalanan Biasa	96,574,086
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,450,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0
Jumlah	100,024,086

Terdapat selisih nilai perjalanan dinas antara LO dengan LRA. Pada LRA tercatat senilai Rp 89,155,192. Selisih senilai Rp 10,868,894 adalah nilai transaksi atas GUP yang SP2D tercatat dibulan berikutnya.

Beban Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 sebesar Rp 0.

Beban Bantuan

Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban

*Penyusutan dan
Amortisasi Rp
379,973,725*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 sebesar Rp 379,973,725. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	305,472,412
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,785,877
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	24,436,888
Beban Penyusutan Irigasi	2,179,359
Beban Penyusutan Jaringan	1,099,189
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	379,973,725

Beban

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Surplus dari

*Kegiatan Non
Operasional Rp -
3,330,200*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non

Operasional per 30 Juni 2025 sebesar Rp 3,330,200. Rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	2025
Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3,330,200
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3,330,200

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. Tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
21,886,141,756*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 21,886,141,756.

*Defisit LO
Rp
(4,734,387,556)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Pada Laporan Keuangan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp (4,734,387,556). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Persediaan Aset
Tetap/Aset
Lainnya Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp 0. Nilai ini adalah koreksi pencatatan modul aset tetap atas konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

*Transaksi Antar
Entitas Rp
4,097,400,903*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 sebesar Rp 4,097,400,903. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,194,158,232
Diterima dari Entitas Lain	(1,096,757,329)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4,097,400,903

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025. DKEL sebesar Rp 5,194,158,232 sedangkan DDEL sebesar Rp - 1,096,757,329.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar per tanggal 30 Juni 2025 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah masing – masing sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Tidak ada Pengesahan Hibah Langsung maupun Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per

tanggal 30 Juni 2025 pada Balai Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak.

Ekuitas Akhir Rp E.5 Ekuitas Akhir

21,249,155,103

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar
Rp 21,249,155,103.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian Penting yang dialami Satker Balai
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
Pontianak berdiri pada tahun 2009. Adapun
Struktur Organisasi Keuangan Balai Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak TA. 2025
adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran :

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen :

Eki Saputra Risja, S.E

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Anggun Nurlisa, S.St.Pi

Bendahara Pengeluaran :

Pramita Putri Utami

Bendahara Penerimaan :

M. Andry Wiratman, S.Pi

Operator Modul GLP :

Eki Saputra Risja, S.E

Operator Modul BMN :

Hendrikus Luat Maring

Operator Modul Persediaan :

Tiar Evi Yani

2. Pagu DIPA BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2025 bersumber dari 2 yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan 30 Juni 2025 data pagu anggaran dan realisasi berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut :

Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi
Rupiah Murni	11,421,280,000	5,194,158,232 (45,48%)
PNBP	5,425,000,000	0

3. Sampai dengan 30 Juni 2025 telah dilaksanakan revisi sebanyak 6 kali. Penjelasan atas Revisi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah sebagai berikut :

1) Revisi ke-1 POK (30 Januari 2025)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka revisi komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor berupa belanja listrik, air dan barang konsumsi serta operasional kendaraan lainnya yang akan disiapkan untuk membantu biaya pemeliharaan.

2) Revisi ke-2 POK (6 Februari 2025)

Revisi POK kewenangan KPA dalam rangka revisi komponen operasional dan pemeliharaan kantor berupa belanja keperluan perkantoran, belanja barang persediaan barang konsumsi dan penyesuaian revisi terhadap kegiatan layanan kepegawaian lingkup bpspl pontianak.

3) Revisi ke-3 DJA (25 Februari 2025)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka penyesuaian jumlah anggaran dengan kode Blokir 2 dan A pada DIPA BPSPL Pontianak. Dimana jumlah kode blokir 2 yang ditetapkan

sebanyak Rp. 1.567.600.000 dan kode blokir A sebanyak Rp. 4.101.040.000. Selanjutnya UPT juga menyesuaikan jumlah blokir tersebut dengan total jenis Belanja Perjalanan Dinas (524xxx) yang harus dipenuhi di masing-masing kegiatan BPSPL Pontianak.

4) Revisi ke-4 POK (4 Maret 2025) :

Revisi POK kewenangan KPA dalam rangka revisi redaksi detail pada beberapa kegiatan teknis seperti Kegiatan Rekomendasi Rekomendasi Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil, Sosialisasi KKPRL dan beberapa perjalanan dinas yang berdampak nilai blokir pada kegiatan Dukungan Manajemen.

5) Revisi ke-5 DJA (14 April 2025)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka penyesuaian jumlah blokir kode A dan 2, dimana terdapat usulan pembukaan blokir A pada Dirjen PKRL. BPSPL Pontianak sendiri memiliki nilai blokir A yang diusulkan sebesar Rp. 153.842.000 yang berasal dari akun Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Biasa dalam Kota.

6) Revisi ke-6 KANWIL (22 April 2025)

Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA kewenangan Kanwil DJPb Kalimantan Barat. Revisi ini merupakan bagian dari updating realisasi TW I dan target yang akan dicapai di Triwulan II sebesar 34.37%. Adapun persen realisasi di TW I adalah sebesar 17.47% yang memiliki nilai IKPA maksimal karena adanya kebijakan pelonggaran perhitungan nilai IKPA oleh Kementerian Keuangan.

4. BPSPL Pontianak tahun 2025 menyelenggarakan PIPK dengan menetapkan 3 akun signifikan yaitu :

1) 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada kas di bendahara pengeluaran dilakukan pengumpulan dokumen pendukung yaitu surat terkait UP, SP2D, LPJ bulanan, SPBy, BA kas, rekening koran.

2) 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya

Pada pendapatan perizinan lainnya dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen terkait rekomendasi perijinan SAJI, data Simponi, LPJ bendahara penerimaan, laporan realisasi pendapatan.

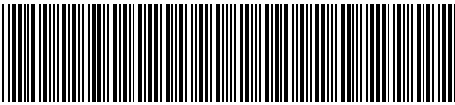
3) 132111 Peralatan dan Mesin

Pada peralatan dan mesin dokumen terkait dalam data dukung PIPK adalah dokumen terkait kontrak, kuitansi, BAST, Neraca dan Posisi BMN, SIMAN.

Penetapan akun signifikan sudah disampaikan ke unit Eselon I. Perkembangan PIPK BPSPL Pontianak untuk semester I tahun 2024 sudah penyusunan tabel A.

5. Pada pagu BPSPL Pontianak terdapat Program Prioritas Nasional dengan penjelasan pagu dan realisasi untuk periode s.d 30 Juni 2025 sesuai dokumen terlampir.
6. Pelaporan capaian output BPSPL Pontianak telah berlangsung sejak Januari sd Juni 2025. Dengan detail capaian RO sesuai dokumen terlampir.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025
I A. INFORMASI KINERJA



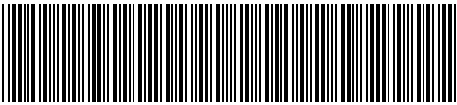
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output	:	01	PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem (PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2362.PCA	Perizinan Produk	5,00	Produk, Keputusan	1.752.592.000
Rincian Output	:	01	PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	5,00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2362.PEE	Kemitraan	1,00	Kesepakatan	150.000.000
Rincian Output	:	01	PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem (PN)	1,00	Kesepakatan	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik	5,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.211.218.000
Rincian Output	:	01	QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem (PN)	1,00	dokumen	661.218.000
		02	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	4,00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	5,00	Unit	113.500.000
Rincian Output	:	01	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem (PN)	5,00	Unit	113.500.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies	2,00	Jenis	572.690.000
Rincian Output	:	01	REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif) (PN)	2,00	Jenis	572.690.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025
I A. INFORMASI KINERJA

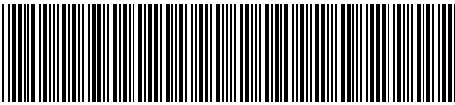


DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Konservasi Jenis/Spesies						Jenis		
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output		:	01 SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	(PN)	15.00	Orang	100.000.000
		:	02 SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	(PN)	24.00	Orang	250.000.000
Program		:	032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				1.075.000.000
Kegiatan		:	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output		:	01 PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	(PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan		:	2366	Penataan Ruang Laut				875.000.000
		:						
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output		:	01 PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	(PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program		:	032.07.WA	Program Dukungan Manajemen				11.421.280.000
Kegiatan		:	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	35.780.000
		:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000
		:	04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000
		:	05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-06

Kementerian Negara/Lembaga : 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Eselon 1 : 032.07 - DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Wilayah/Provinsi : 13.51 - KOTA PONTIANAK/KALIMANTAN BARAT

Satuan Kerja : 477425 - BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : 1

Tanggal Cetak : 08-07-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
04	EKONOMI	11,621,280,000.00	5,198,969,213.00	44.74%							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	11,621,280,000.00	5,198,969,213.00	44.74%							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	200,000,000.00	0.00	0%							
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200,000,000.00	0.00	0%							
PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	200,000,000.00	0.00	0%							
001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	200,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Rekomendasi Kebijakan	0.0000	5%	5%	(00)	Belum ada progres realisasi kegiatan.
WA	Program Dukungan Manajemen	11,421,280,000.00	5,198,969,213.00	45.52%							
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	11,421,280,000.00	5,198,969,213.00	45.52%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,140,980,000.00	5,182,301,111.00	46.52%							
956	Layanan BMN	35,780,000.00	6,589,334.00	18.42%	4.0000	Layanan	0.0000	26.38%	7.96%	(00)	Realiasai kegiatan berupa: 1. Melaksanakan kegiatan monitoring aset BMN ke Wilker Balikpapan 2. Monev Alat Angkut Darat Bermotor Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	45,300,000.00	17,225,182.00	38.02%	1.0000	Layanan	0.0000	49.98%	11.96%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	64,000,000.00	20,068,829.00	31.36%	1.0000	Layanan	0.0000	49.98%	18.62%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
962	Layanan Umum	109,900,000.00	31,343,945.00	28.52%	1.0000	Layanan	0.0000	47.98%	19.46%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
994	Layanan Perkantoran	10,886,000,000.00	5,107,073,821.00	46.91%	1.0000	Layanan	0.0000	49.98%	3.07%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	83,900,000.00	7,089,397.00	8.45%							
954	Layanan Manajemen SDM	83,900,000.00	7,089,397.00	8.45%	30.0000	Orang	0.0000	21.4%	12.95%	(00)	Realisasi kegiatan berupa: 1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan webinar secara daring atau luring. 2. Peremajaan Data SIASN. 3. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2024. 4. Menghadiri Kegiatan Forum Human Capital dan Pembangunan Integritas serta Orientasi CPNS. 5. Penyampaian Perpanjangan Masa Tugas Belajar. 6. Penyampaian Usulan Kenaikan Gaji Berkala, Penyesuaian Masa Kerja, Kenaikan Pangkat, dan Mutasi Masuk Alih Tugas Pegawai. 7. Penyampaian Surat Keterangan Penempatan Pegawai. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	196,400,000.00	9,578,705.00	4.88%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	0.0000	10.58%	10.58%	(00)	Realisasi kegiatan berupa: 1. Penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) dan Surat Tugas Penempatan Pegawai. 2. Penyusunan Rencana Aksi dan Pengisian Proyeksi Penerimaan PNBP. 3. Pembahasan Rencana Program Tahun 2025 - 2029. 4. Penyusunan dan Penyampaian Rencana PNBP Tahun 2026. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	80,100,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	0.0000	9.94%	9.94%	(00)	Realisasi kegiatan berupa: 1. Pemantauan Kinerja s.d. Periode Juni. 2. Penyusunan Laporan SPIP MR Periode Juni. 3. Pengisian Capaian Output Periode Juni. 4. Pengisian Data Realisasi Kegiatan Bulan Juni 2025 Melalui Aplikasi e-Monev Bappenas. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
955	Layanan Manajemen Keuangan	56,300,000.00	9,578,705.00	17.01%	1.0000	Dokumen	0.0000	19.01%	2%	(00)	Realisasi kegiatan berupa: 1. Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan atas Penerapan PIPK. 2. Pelaksanaan Asistensi Penilaian Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Tabel A) PIPK Tahun 2025 Lingkup DJPK dan DJPRL. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	5,225,000,000.00	0.00	0%							
04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	5,225,000,000.00	0.00	0%							
FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	4,350,000,000.00	0.00	0%							
2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	4,350,000,000.00	0.00	0%							
PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	200,000,000.00	0.00	0%							
001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	200,000,000.00	0.00	0%	2.0000	Rekomendasi Kebijakan	0.0000	5%	5%	(00)	Belum ada progres realisasi kegiatan.
PCA	Perizinan Produk	1,752,592,000.00	0.00	0%							
002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	1,752,592,000.00	0.00	0%	5.0000	Produk	0.0000	6.14%	6.14%	(00)	Realisasi Kegiatan berupa: 1. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi). 2. Pendataan Hiu dan Pari (Appendiks). Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.
PEE	Kemitraan	150,000,000.00	0.00	0%							
001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	150,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Kesepakatan	0.0000	5%	5%	(00)	Belum ada progres realisasi kegiatan.
QMA	Data dan Informasi Publik	1,211,218,000.00	0.00	0%							
001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	661,218,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	0.0000	6.53%	6.53%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Realisasi kegiatan berupa pelaksanaan tugas rutin pengelolaan kawasan konservasi (mandiri dan bersama mitra). Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.
002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	550,000,000.00	0.00	0%	4.0000	Dokumen	0.0000	5%	5%	(00)	Belum ada progres realisasi kegiatan.

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	113,500,000.00	0.00	0%							
001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	113,500,000.00	0.00	0%	5.0000	Unit	0.0000	5%	5%	(00)	Belum ada progres realisasi kegiatan.
REB	Konservasi Jenis/Spesies	572,690,000.00	0.00	0%							
001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	572,690,000.00	0.00	0%	2.0000	Jenis	0.0000	8.5%	8.5%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Realisasi kegiatan berupa Pencatatan Kegiatan Respon Cepat secara Insidental. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	350,000,000.00	0.00	0%							
001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	100,000,000.00	0.00	0%	15.0000	Orang	0.0000	5%	5%	(00)	Belum ada progres realisasi kegiatan.
002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	250,000,000.00	0.00	0%	24.0000	Orang	0.0000	5%	5%	(00)	Belum ada progres realisasi kegiatan.
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	875,000,000.00	0.00	0%							
2366	Penataan Ruang Laut	875,000,000.00	0.00	0%							
PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	875,000,000.00	0.00	0%							
009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	875,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Rekomendasi Kebijakan	0.0000	7.7%	7.7%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Realisasi kegiatan berupa: 1. Pengendalian PKKPRL 2. Koordinasi Kegiatan Pemanfaaaatan Ruang Laut 3. Pendampingan Pengawasan KKPRL 4. Penilaian Teknis PKKPRL Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.